

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda
3.3	Program dan Kegiatan

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Kebijakan nasional terkait dengan perencanaan pembangunan terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang. Dokumen perencanaan tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) disusun oleh OPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari RKPD.

Pengendalian atau evaluasi juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terhadap dokumen perencanaan yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan terhadap keselarasan antar dokumen dan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan. Evaluasi keselarasan antar dokumen dapat dilihat dari konsistensi penuangan program kegiatan dalam pencapaian indikator. Pengukuran pencapaian sasaran diukur melalui indikator pencapaian sasaran dalam perwujudan visi misi.

Regulasi yang mengatur RKPD, mengamanatkan penyusunan RKPD Tahun 2020 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 dan APBD Tahun 2020. Adapun penyusunan RKPD didasarkan pada hasil evaluasi RKPD tahun 2018. Adanya Penyusunan RKPD 2020, di ikuti dengan penyusunan renja OPD yang merupakan bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan akhir RKPD dan nantinya sebagai dasar bagi OPD dalam penyusunan RKA OPD. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan - tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasikan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pelaksanaan tupoksi setiap OPD tidak dapat dipisahkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan provinsi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah bersifat komprehensif dan sinergis, yaitu memiliki arti bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Semua urusan yang telah di limpahkan kepada pemerintah daerah dibagi habis dalam setiap OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Isu-isu strategis yang merupakan fenomena nyata yang wajib dicermati dan diidentifikasi dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan Renstra Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah maka untuk kesinambungan dan keselarasan dengan kebijakan nasional maupun provinsi, benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

Adapun identifikasi isu-isu strategis yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagaimana yang terdapat di dalam Renstra OPD dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan SKPD	Terdapat beberapa aspek manajerial yang harus ditindaklanjuti	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	<ol style="list-style-type: none">1. Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;2. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus;3. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang;4. Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan;5. Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD;6. Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;7. Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang;8. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;9. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;10. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;11. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
Kajian terhadap Visi Misi Kepala Daerah Terpilih	Masih adanya koordinasi, perencanaan dan monev bidang Perencanaan, Ekonomi Praswil dan Pemsosbud yang perlu disusun, di implementasikan dan monitoring implementasinya secara intensif	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian Renstra Bappenas 2014-2019	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappenas	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian terhadap RTRW Kota Magelang		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian terhadap KLHS		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai		

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
				<p>12. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang (terkait dengan SOP)</p> <p>13. Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM</p> <p>14. Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan</p>

Kebijakan Nasional sebagaimana terdapat di dalam RKP Tahun 2019, tidak terlepas dengan tema pembangunan yang diusung. RKP 2020 merupakan tahun transisi dengan usulan tema yang di usung adalah **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”** Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, integratif dan spasial. Seiring dengan tema pembangunan tersebut maka Pemerintah menempatkan lima usulan prioritas nasional sebagai berikut: a). Pembangunan manusia; b). Penguatan konektivitas; c). Peningkatan nilai tambah ekonomi; d). Pemantapan ketahanan energi pangan dan sumber daya air; dan e). stabilitas keamanan nasional

Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan substansi pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, tematik, integratif dan spasial. Sedangkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah, tema pembangunan pada tahun 2020 adalah **“Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”**. Tema dimaksudkan untuk mencapai Visi Menuju Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu **Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.**

Adapun tema tersebut sebagai pendekatan solusi atas 7 (tujuh) isu strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Kemiskinan
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
4. Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan Daya dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber daya alam
5. Kedaulatan Pangan dan Energi
6. Kesenjangan wilayah
7. Tata Kelola Pemerintahan

Dengan mendasarkan pada pemecahan isu tersebut maka prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah diprioritaskan pada :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada :
 - a. Pengurangan Kemiskinan
 - b. Menurunkan angka pengangguran
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah, fokus pada :a). Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas; b). Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan dan c). Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan, fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan upaya diantaranya:
 - a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian;
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan ;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik;
 - g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan.
 - i. Peningkatan kualitas air, udara, serta tutupan lahan
 - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada :
 - a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*)
 - b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan).
 - c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel
 - d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya
 - e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA.

- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal

Sementara itu untuk sasaran makro pembangunan Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 yaitu: a). Pertumbuhan Ekonomi antara 5,4 – 5,8%; b). PDRB per kapita sebesar Rp. 28,5 juta; c). Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$; d). Kemiskinan turun menjadi 9,81% ; e). Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33%; f). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72 ; g). Indeks Gini sebesar 0,34; h). Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,25 dan i). Indeks Williamson sebesar 0,59.

Untuk pembangunan kewilayahan dilakukan dengan memperhatikan :

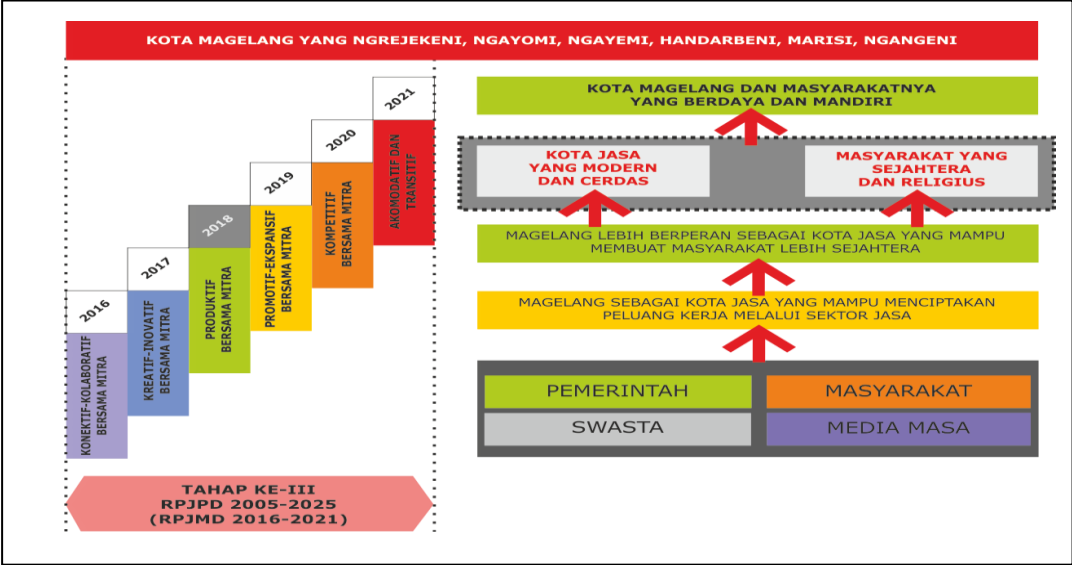
- 1). Integrasi dan sinergi program/kegiatan, sasaran dan lokus dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2020.
- 2). Keterpaduan dan dukungan penanganan program/proyek strategis/prioritas nasional di Jawa Tengah.
- 3). Arah kebijakan pembangunan kewilayahan khususnya terkait dengan kota Magelang adalah Wilayah Pengembangan Purwomanggung diarahkan untuk “Pengembangan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”, dengan upaya antara lain : Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas; Pembangunan SPAM Regional Keburejo (Kebumen) dan fasilitasi pembangunan Bendungan Bener; pengelolaan kelestarian lingkungan (sampah); pengembangan agropolitan dan pariwisata khususnya KSPN Borobudur.
- 4). Sinergitas kabupaten/kota dalam pencapaian skenario sasaran makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, khususnya Kota Magelang adalah : a). Pertumbuhan Ekonomi pada 5,3-5,7%; b). Angka Kemiskinan berada pada kisaran 7,5-8,5%; c). Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan pada range 5,2-5% dan e). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,00

Dengan pendekatan yang sama **tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2020** adalah “**Promotif Dan Ekspansif Bersama Mitra**”. Tema Tahun perencanaan 2020 yang merupakan tahun ke empat RPJMD Kota Magelang adalah Promotif dan Ekspansif Bersama Mitra. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan penekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang ditandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah **rancangan promosi dan perluasan pasar produk dan citra kota** yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Pada tahun 2018-2019 **ini diasumsikan**:

- a. sudah terbentuk sistem basis data terpadu untuk perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana aksi daerah dan pengukuran kinerja terintegrasi;

- b. Sudah terbentuk kesediaan kerjasama kemitraan: dengan dunia usaha, media, forum warga masyarakat;
- c. kondusivitas kota semakin baik karena internalisasi nilai religiusitas semakin berkembang

Deskripsi komprehensif atas tema tersebut nampak pada gambar berikut :



Gambar 3-1 Gambar Tema dan Arah kebijakan Tahun 2020

Selain itu Kota Magelang berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dan mendorong serta selaras dengan pencapaian tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Gambaran keselarasan antar tema pembangunan nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Keterkaitan antar tema Pembangunan dalam RKP, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kota Magelang Tahun 2020

Tema RKP Tahun 2020	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2020	Benang Merah keterkaitan
Pembangunan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Berkualitas	Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”.	Promotif dan Ekspansif Bersama Mitra	Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang ditandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan promosi dan perluasan pasar produk dan citra kota yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya dengan memberi daya dorong pada perwujudan tema pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun pada RKP Tahun 2020

Sumber : RKPD Pemerintah Kota Magelang tahun 2020

Tema tersebut mencoba untuk mengatasi berbagai isu strategis pada tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
- c. Penguatan reformasi birokrasi;
- d. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
- g. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
- h. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

Jika disandingkan antara isu strategis level nasional, provinsi dan kota Magelang tahun 2020 akan nampak koneksitas isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.3 Koneksitas antar isu strategis Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No	Isu Strategis		
	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang
1		Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar▪ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri
2		Peningkatan Kualitas dan daya saing Sumber daya manusia	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar
3		Daya saing ekonomi Dan Peningkatan kesempatan Berusaha	<ul style="list-style-type: none">▪ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal▪ Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
4		Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

No	Isu Strategis		
	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang
5		Kedaulatan pangan dan energi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
6		Kesenjangan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi); Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri
7		Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan reformasi birokrasi Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah

Sumber : RKPD Pemerintah Kota Magelang tahun 2020

Jika disandingkan antara isu strategis level nasional, provinsi dan kota Magelang pada tahun 2020 akan nampak koneksitas isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.4 Keterkaitan antara Fokus prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Magelang
1	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran	Daya serap peluang kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin tinggi dengan pengembangan model ekonomi cerdas (<i>smart economy</i>)
2	Pembangunan Manusia	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> Kota Magelang sudah menampilkan ciri modern, maju, dan religius dalam tata kota dan pola kehidupan masyarakatnya Kota Magelang semakin mapan dengan budaya pembangunan partisipatif, demokratis, bermitra dengan forum warga dan dunia usaha
3	Pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Daya serap peluang kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin tinggi dengan pengembangan model ekonomi cerdas (<i>smart economy</i>) Ketegasan regulasi mengusung konsep infrastruktur yang berkeadilan bagi semua golongan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Magelang
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan lingkungan secara smart berkembang baik (smart environment)
4	Stabilitas keamanan nasional	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik semakin mantap berbasis teknologi informasi ▪ Daya serap peluang kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin tinggi dengan pengembangan model ekonomi cerdas (smart economy) ▪ Kota Magelang semakin mapan dengan budaya pembangunan partisipatif, demokratis, bermitra dengan forum warga dan dunia usaha

Sumber : RKPD Pemerintah Kota Magelang tahun 2020

Terkait dengan hal tersebut di atas maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Renja 2020 mengacu pada arah kebijakan dan prioritas Daerah, Propinsi dan Nasional dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategi yang di hadapi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Walikota Magelang, maka dalam rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan arsitektur kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran Renja OPD dilakukan dengan mengacu tujuan dan sasaran pada Perubahan Renstra Bappeda 2016-2021.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renja 2020 sebagaimana tujuan yang terdapat dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Magelang tahun 2016-2021 antara lain:

- Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan
- Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku
- Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
- Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan

pembangunan bidang perencanaan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang berkualitas

- g. Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
- h. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah

Guna mewujudkan tujuan jangka menengah di atas, maka sasaran-sasaran yang hendak dituju BAPPEDA Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan pertama*, Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan adalah Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan
- b. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan ke dua* Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan adalah Tersedianya sarpras yang berkualitas
- c. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan ke tiga*, Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku .
- d. Untuk mewujudkan *tujuan ke empat*, Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif
 - 2) Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate
 - 3) Terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan
- e. Untuk mewujudkan *tujuan ke lima*, Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dengan sasaran Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan
- f. Untuk mewujudkan *tujuan ke enam*, Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas.
 - 2) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas
 - 3) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas

g. Untuk mewujudkan *tujuan ke tujuh*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Perencanaan
- 2) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
- 3) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

h. Untuk mewujudkan *tujuan ke delapan*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJM
- 2) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
- 3) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya

Berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021, Indikator kinerja pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berikut indikator kinerjanya sebagaimana tersaji dalam tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Indikator Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Presentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
2	Prosentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Presentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
4	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44.83%	51.72%	58.62%	65.52%	75.86%	82.76%	89.66%	89.66%

Tujuan dari penyusunan rencana kerja Bappeda adalah untuk menyelaraskan program kegiatan pada tahun 2020 sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam Renstra OPD dengan mengacu pada dokumen perencanaan tingkat kota serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 terhadap target capaian indikator dan penyelarasan terhadap kebijakan dan aturan yang berkembang.

Sasaran dari penyusunan renja ini antara lain:

- a. Menyelaraskan program kegiatan sesuai dengan target capaian Sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020;
- b. Menyelaraskan program kegiatan sesuai dengan target capaian program kegiatan pada tahun 2020;
- c. Menyelaraskan program kegiatan dengan kebijakan pusat dan provinsi yang belum tertampung dalam perencanaan awal;
- d. Menyelaraskan program kegiatan dengan kebijakan daerah yang ada, dan;
- e. Menyelaraskan program kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan sebagaimana analisis kebutuhan program dan kegiatan yang disajikan pada bab sebelumnya merupakan hasil analisis atas kebijakan-kebijakan pusat, provinsi dan daerah terkait fungsi penunjang perencanaan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang.

Beberapa program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh peraturan tentang perencanaan pembangunan adalah penyusunan dokumen RKPD dari pelaksanaan musrenbang sampai dengan penyusunan perwal RKPD. Selain itu, mulai tahun 2013 disusun Perubahan RKPD sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan tahun berkenaan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen APBD Tahun 2018 Kota Magelang dan capaian indikator kinerja pada tahun 2018 sebagai dasar dalam penyusunan program kegiatan dalam penyusunan Renja OPD. Hasil evaluasi tersebut akan menunjukkan program kegiatan mana yang perlu didorong untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD maupun RKPD. Selain itu, perkembangan kondisi keuangan dan kebijakan akan mendorong adanya penyelarasan beberapa program kegiatan untuk ditambahkan dalam dokumen perubahan renja.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan program dan kegiatan yang masuk dalam ketiga kategori program prioritas sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2020. Adapun ketentuan tentang ketiga program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program prioritas pertama merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau Program Unggulan Kepala Daerah, kesepakatan hasil musrenbang, hasil telaahan

pokok pikiran dewan serta program intervensi yang bersifat nasional/provinsi dan hasil FGD.

- b. Program prioritas kedua merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2020 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021.
- c. Program prioritas ketiga merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD.

Program – program yang tercermin dan menjadi pertimbangan di dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 telah mempertimbangkan beberapa hal yang prioritas dan kebijakan nasional dan kebijakan daerah selain beberapa program kegiatan rutin yang dilaksanakan semua OPD dan menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal terkait prioritas dan kebijakan yang menjadi landasan dalam penyusunan program kegiatan di dalam Renja 2020, seperti : a). pencapaian visi misi kepala daerah, b). pencapaian SDGs, c). pengentasan kemiskinan, d). pendayagunaan potensi ekonomi daerah , dan kebijakan atau prioritas lainnya. Hal – hal tersebut di atas tercermin di dalam program dan kegiatan yang terdapat di dalam Renja 2020. Konfigurasi program pada Renja Bappeda Kota Magelang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2. Program Perencanaan pembangunan bidang ekonomi
- 3. Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
- 4. Program Perencanaan bidang fisik dan prasarana
- 5. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- 6. Program Pelayanan administrasi perkantoran
- 7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 9. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Secara keseluruhan di dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 terdapat 9 Program dan 51 kegiatan dengan pagu Total Renja Tahun 2020 sebesar Rp. 4.154.340.000,- . Program kegiatan yang akan dilakukan oleh Bappeda Kota Magelang dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan tersebut secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Di excel 16-27